

MODEL PEMETAAN POTENSI SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN MADIUN

Marseto

Dosen Ekonomi Pembangunan, FEB UPN “Veteran”Jatim

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of economic development on the economy sector regencies / cities in East Java. The method used in this research is quantitative research and using secondary data. In analyzing the selected sectors or potential in order to focus on the subject matter is used to test the Location Quotient (LQ) and analysis Multi-Plier, with a research focus. Analyzing the impact of economic development on development in East Java province.

The analysis used is qualitative analysis, which analyzes that are explained in the description or in the form of sentences and quantitative analysis is an analysis using formulas and definitive analysis. Quantitative analysis includes the analysis of the degree of fiscal decentralization to determine the level of independence of regional and sectoral economic potential in the district / city in East Java that can determine the level of fiscal independence and economic potential of the region.

Results are expected to be used to assess the pattern of the relationship between the central government and the government at the district / city in East Java and the formula right policy for future economic development.

Keywords: LQ, multiplier-effect, Fiscal Decentralization, Local Self-Reliance

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan sektor Ekonomi terhadap perekonomian Kabupaten Madiun . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Dalam menganalisis sektor-sektor unggulan atau potensial agar terarah pada pokok permasalahannya digunakan uji *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Multi Plier* , dengan fokus penelitian .Menganalisis dampak pembangunan sektor ekonomi terhadap pembangunan di propinsi Jawa Timur

Dengan LQ persektor memiliki sumbangan tertinggi terhadap pembangunan di Kabupaten Madiun dan sektor tersebut diduga akan memiliki Multiplier yang semakin meningkat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi daerah Kabupaten Madiun Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kuantitatif yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal untu mengetahui tingkat kemandirian daerah dan potensi ekonomi sektoral di Kabupaten Madiun sehingga dapat mengetahui potensi Ekonomi daerah yaitu Sektor basis di

Kabupaten Madiun adalah Sektor-sektor : Pertanian, Perdagangan, dan Jasa. Serta Multiplier efek sebesar 5,5 tahun 2010 dan 5,6 tahun 2012 yang artinya ada pergeseran di sektor basis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan mengetahui pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di kabupaten /Kota di Jawa Timur (Kabupaten Madiun) serta formula kebijakan yang tepat untuk pengembangan ekonomi ke depan

Kata kunci : LQ, Multiplier effect , Desentralisasi fiskal, Kemandirian Daerah

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan pembangunan selalu melibatkan dimensi kewilayahan (spasial). Karena itu, kegiatan perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek kewilayahan secara komprehensif. Untuk keperluan tersebut maka sistem informasi yang digunakan untuk mengelolanya harus berbasis pada teknologi sistem informasi geografis. Berdasar pertimbangan tersebut maka diperlukan untuk menyusun suatu sistem informasi tentang potensi wilayah berbasis teknologi sistem informasi geografis yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu tumpuan dan harapannya adalah dengan cara menggali dan mengoptimalkan Potensi Daerah.

Salah satu aspek desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Kebijakan Fiskal pada dasarnya alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting perannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang dikehendakinya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha, investor, maupun yang lainnya.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengalihan sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Desentralisasi kekuasaan dan distribusi pengambilan keputusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan pilihan kebijakan strategi masa depan yang tidak dapat di hindarkan dan di tunda dalam perencanaan

TINJAUAN PUSTAKA

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto Adalah jumlah seluruh nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor/ lapangan usaha yang melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah/ *region* (dalam hal ini Kabupaten /Kota), tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan kata lain PDRB menunjukkan Gambaran *Production Originated* (Anonim, 2009:2).

Produk Domestik Regional Bruto Adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). (Anonim, 2013:6)

Pengertian LQ (Location Quotien)

Adalah merupakan suatu alat digunakan untuk menilai PDRB untuk melihat sektor mana yang basis sektor apa yang bukan basis .LQ dan digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor sektor yang menjadi unggulan suatu daerah. LQ juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas suatu daerah. Dalam perumusannya LQ ini membandingkan sektor tertentu di kabupaten dibanding dengan sektor yang sama di Propinsi dibagi dengan Total PDRB kabupaten dibanding dengan Total PDRB Propinsi

1. Location Quotient (LQ)

Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis. Formulasi dari teknik analisis tersebut adalah: (Iwan Jaya Azis, 1993)

$$LQ_{ji} = \frac{VA_{ji} / VA_i}{PDRB_j / PDRB_i}$$

Keterangan:

LQ_{ji} = Location Quotient sektor i di daerah J

VA_{ji} = Nilai tambah sektor i di daerah J

VA_i = Nilai tambah sektor i di tingkat kabupaten

$PDRB_j$ = Produk Domestik Regional Bruto di daerah J

$PDRB_i$ = Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Dari hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diartikan dalam dua kategori, yaitu:

- Bila nilai LQ lebih kecil atau sama dengan 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis.
- Bila nilai LQ lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis.

Multiplier Efek

Keterkaitan satu sektor dengan sektor lain merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan sektor strategis. Keterkaitan antar sektor dapat dilihat dari dampak pengganda multiplier effect suatu sektor yang dapat membangkitkan kegiatan di sektor lainnya. Penentuan dampak pengganda suatu sektor di dasarkan

pada landasan teoritis analisis ekonomi basis (economic base analysis) dampak pengganda suatu sector Basis dengan sektor non basis makin besar multiplier suatu daerah maka semakin baik daerah tersebut untuk menumbuhkan ekonominya. (Mudrajat Kuncoro: 2010 hal 98)

Adapun Rumus Multiplier adalah :

$$r_1 = \frac{E_{bi}}{E_{si}}$$

Dimana:

r_1 = Dampak pengganda (*multiplier effect*)

E_{si} = Aktivitas sektor non basis

E_{bi} = Aktivitas sektor basis

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis parameter yang akan diteliti baik itu mengetahui potensi daerah maupun untuk mengetahui kemandirian daerah maka definisi Operasional Variabel adalah sebagai berikut:

PDRB dalam penelitian ini dilihat menurut pendekatan produksi yaitu merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada suatu jangka waktu tertentu tertentu yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor. Yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa dan dinyatakan dalam (Rp juta).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa LQ

Untuk melihat hasil penelitian ini maka kita lihat tabel PDRB Kabupaten madiun dan Jawa Timur serta analisa LQ

(LQ) Kabupaten Madiun

No.	Sektor	PDRB per sektor (milyar Rp)		PDRB per sektor Prov. Jatim (milyar Rp)		LQ2010	LQ2012
		2010	2012	2010	2012		
1	Pertanian	2,566.96	3,149.49	122,624.00	154,459.00	2.36	2.33
2	Pertambangan dan penggalian	32.47	36.29	17,031.00	20,803.00	0.22	0.20
3	Industri pengolahan	247.24	305.02	214,025.00	271,596.00	0.13	0.13
4	Listrik, gas, air bersih	60.22	74.92	11,767.00	13,555.00	0.58	0.63

5	Konstruksi	279.21	371.19	34,994.00	45,551.00	0.90	0.93
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	2,272.93	3,047.55	229,405.00	304,498.00	1.12	1.14
7	Pengangkutan dan komunikasi	242.25	314.75	42,948.00	57,090.00	0.64	0.63
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	186.7	222.72	38,165.00	50,558.00	0.55	0.50
9	Jasa-jasa	1,010.72	1,257.97	67,606.00	83,610.00	1.69	1.72
PDRB Total		6,898.71	8,779.90	778,565.00	1,001,721.00	-	

Sektor basis di Kabupaten Madiun tahun 2010 adalah sektor-sektor : Pertanian ,Perdagangan, dan jasa , dan pada tahun 2012 adalah sektor . pertanian Perdagangan dan jasa jadi tidak ada pergeseran sektor basis dari data LQ ini maka dapat diketahui Multiplier madiun tahun 2010 dan 2012 ; Multiplier adalah jumlah sektor basis dibagi dengan sektor non basis maka untuk tahun 2010 Multiplier adalah $5850,61 : 1048,09 = 5,582$, Multiplier tahun 2012 adalah $7455,01 : 1324,89 = 5,628$ artinya ada peningkatan sektor basis di daerah Madiun

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. di kabupaten madiun Sektor basis adalah 3 sektor yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan. dan jasa – jasa
2. Di kabupaten Madiun terjadi pergeseran pada sektor Basis

Saran

1. Perlu adanya pengembangan sektor lain untuk menjadi basis yaitu sektor konstruksi

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1993, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Penerbit Beringin Jaya, Semarang .
- _____, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Penerbit Kuraiko Pratama, Bandung.
- _____, 2005, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- _____, 2007, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- _____, 2009, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- Basri, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI (Distorsing, Peluang dan Kendala)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bastian, 2001, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001*, Penerbit BPFE , Yogyakarta.

- Dasril, Henry & Hessel, 2004, *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta
- Elmi, Bchrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Fuad, 2004, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.
- Ibnu Syamsi, 1993, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, cetakan kedua, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Khusaini, 2006, *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Penerbit BPFE UNIBRAW, Malang.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Riduansyah, 2003, *Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi daerah*, www.ekonomirakyat.org
- Saragih, Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta ; Penerbit Ghalia Indonesia